

## UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN

Oleh

**Damayanti Suhita**

### **Abstrak**

*A gender sensitive development mesyaratkan active role human in all fields of development. With the issue of gender equal partnership may not be realized. Gender will hamper the pace of development, because there will be no balance, harmony and harmony between men and women So that the active role of government and the need for more community members opportunities for women in the field of social policy and development.*

**Key Words : Gender issues, development**

---

### **Pendahuluan**

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 , patut kita syukuri bahwa UUD 45 mempunyai kearifan yang luar biasa dari pakar pendiri Republik Indonesia dalam menghargai peranan wanita di masa lampau dan mengantisipasi di masa yang akan datang.

Di dalam GBHN 1993 tercantum: “Wanita baik sebagai sumber daya insane pembangunan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria ditunjukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan, termasuk upaya dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Kedudukan Perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam pembangunan perlu dipelihara, serta ditingkatkan sehingga perempuan dapat memberi sumbangan yang sebesar – besarnya bagi pembangunan bangsa dengan memperhatikan kodrat, harkat dan martabat”

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk merubah keadaan menuju keadaan yang dipandang lebih baik seperti yang dicita – citakan, sehingga tujuan pembangunan bersifat ideal. Definisi pembangunan menurut parah ahli :

Teori modernisasi lahir dalam bentuknya yang sekarang ini, paling tidak menurut tokoh- tokoh Amerika Serikat, sebagai produk sejarah tiga peristiwa penting dunia setelah masa: (1) munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia; (2) pada saat yang hamper bersamaan, terjadi perluasan gerakan komunis dunia; (3) lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Teori evolusi lahir pada awal abad ke-19 sesaat sesudah Revolusi Industri dan Revolusi Prancis yang merupakan dua revolusi yang tidak sekedar menghancurkan tatanan lama, tetapi juga membantuk acuan dasar baru. Pada garis besarnya, teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat sebagai berikut: (1) Teori evolusi menganggap bahwa perubahan social merupakan gerakan searah seperti garis lurus. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitive menuju masyarakat maju; (2) Teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju masyarakat modern merupakan sesuatu tidak dapat dihindari.

Pemikiran Talcott Parsons, ketika pernah sebagai ahli biologi, banyak berpengaruh dengan rumusan teori fungsionalismenya. Baginya, masyarakat manusia tak ubahnya seperti organ tubuh manusia, dan oleh karena itu masyarakat manusia dapat juga dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia.

Analogi dengan tubuh manusia mengakibatkan Parsons merumuskan konsep keseimbangan dinamis stasioner (*homeostatic equilibrium*). Jika satu bagian tubuh manusia berubah, maka bagian lain akan mengikutinya. Demikian pula halnya masyarakat. Masyarakat selalu mengalami perubahan, tetapi teratur. Dengan demikian, masyarakat bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis, sekalipun perubahan itu amat teratur dan selalu menuju pada keseimbangan baru.

Masyarakat tradisional cenderung untuk berhubungan dengan anggota masyarakat dari satu kelompok tertentu, sehingga ada rasa untuk memikul beban tanggung jawab bersama, sementara anggota masyarakat modern berhubungan satu sama lain dengan batas norma-norma universal, lebih tidak terikat dengan tanggung jawab kelompok dan kekhususan. Dengan bekal sedikit pemahaman latar belakang lahir dan warisan pemikiran teori modernisasi, yang diharapkan dapat membantu pemahaman, tiba saatnya untuk menyimak secara detail teori modernisasi.

### **Deferensiasi Struktural**

Di dalam masyarakat modern, institusi keluarga telah mengalami deferensiasi struktural, Keluarga memilikistruktral yang lebih sederhana, berukuran kecil dan hanya terdiri dari keluarga inti. Keluarga modern tidak lagi menjalankan semua fungsi yang dijalankan oleh keluarga dalam masyarakat tradisional. Berbagai lembaga ekonomi telah mengambil alih fungsi produktivitas, lembaga pendidikan menyediakan jasa pengajaran. Setiap lembaga baru yang terbentuk secara khusus menyediakan dan tanggung jawab untuk melaksanakan satu tugas tertentu. Dalam menjawab persoalan ini, Smelser berpendapat bahwa suatu lembaga baru lagi harus dibentuk, yang berperan khusus untuk menjembatani dan mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan masyarakat yang telah terdiferensiasi. Sebagai contoh, ia menunjuk perlunya lembaga “penempatan tenaga kerja” untuk membantu pencari kerja dan menghubungkannya dengan lembaga ekonomi (perusahaan).

Secara ringkas Smelser menguraikan penjelasannya untuk menguji pembangunan negara dunia ketiga dengan menggunakan konsep diferensiasi struktural. Dengan mengaitkan akibat diferensiasi struktural, permasalahan integrasi sosial, dan kemungkinan timbulnya kerusuhan sosial, Smelser menunjuk bahwa modernisasi tidak harus merupakan satu proses yang lacer dan harmonis.

Rostow dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* menyatakan, bahwa ada lima tahapan pembangunan ekonomi, yaitu: *Pertama*, Tahap masyarakat tradisional (*The*

*Traditional Society*). Dengan karakteristik pertanian padat tenaga kerja, belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi mata pencarian, masih ada sistem barter, dan hasil pendapatan belum disimpan;

*Kedua* tahap pembentukan prasyarat tinggal landas (*The preconditions for take off*). Ditandai dengan pendirian industri – industri pertambangan, peningkatan penggunaan modal dalam pertanian, investasi meningkat, terdapat lembaga organisasi tingkat nasional, adanya elit – elit baru dan perubahan sering dipicu oleh gangguan dari luar.

*Ketiga*, tahap Tinggal landas (*The Take Off*). Ditandai dengan industrialisasi meningkat, investasi semakin meningkat, peningkatan pertumbuhan regional, tenaga kerja di sektor pertanian menurun sebaliknya meningkat di sektor industri, adanya inovasi teknologi, sistem perbankan yang lebih baik.

*Keempat*, tahap Pergerakan menuju kematangan ekonomi (*The drive to maturity*). Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diversifikasi industri, penggunaan teknologi secara meluas, pembangunan di sektor – sektor baru, investasi meningkat 10 – 20 % dari pendapatan nasional

*Kelima*, tahap era konsumsi massa tingkat tinggi (*The age of high mass consumption*). Proposisi ketenaga kerjaan yang tinggi di bidang jasa, meluasnya konsumsi atas barang – barang yang tahan lama dan jasa, peningkatan atas belanja jasa – jasa kemakmuran.

Dalam perkembangannya, Rostow lebih jauh menyatakan, bahwa jika satu negara hendak mencapai pertumbuhan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan, maka negara tersebut harus memiliki struktur ekonomi tertentu. Pernyataan yang muncul adalah bagaimana negara dunia ketiga tersebut mampu memperoleh sumber daya yang diperlukan, khusus tinggi. Rostow menguraikan berbagai cara, yaitu: (1) dana untuk investasi dapat digali cara pemindahan sumber dana secara radikal dan atau melalui berbagai kebijaksanaan pajak; (2) dana investasi dapat juga berasal dari lembaga-lembaga keuangan, antara lain bank, pasar uang dan modal, obligasi pemerintah; (3)

dana investasi juga dapat diperoleh melalui perdagangan internasional; (4) dana investasi dapat diperoleh dari investasi langsung modal asing untuk ditanamkan misalnya pada bidang pembangunan prasarana dan pembukaan tambang, dan sektor produktif lainnya

F. Coleman (2000) dalam bukunya *Pembangunan Politik dan Berkeadilan*, menunjuk pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan; dengan bertujuan akhir pada penguatan kapasitas sistem politik. Lebih dari itu, Coleman juga mengingatkan bahwa diferensiasi politik dan tuntutan keadilan memiliki akibat samping berupa ketegangan dan keterpecahbelahan sistem politik. Serupa dengan Smelser, Coleman mengakhiri pembahasan modernisasi politiknya dengan menunjuk pada pentingnya kesiapan untuk menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang timbul disaat tibanya “ waktu krisis pengembangan sistem politik”, jika negara Dunia Ketiga hendak terus melanjutkan modernitasnya. Dengan demikian, secara ringkas, modernisasi politik bagi Coleman dapat diukur dengan seberapa jauh kapasitas system politik berkembang untuk mampu menghadapi dan mengatasi krisis-krisis yang diciptakan sendiri dalam proses perkembangannya.

Durkheim berpendapat pembangunan adalah proses perubahan dalam masyarakat dalam dimensi kuantitatif dan kualitatif yaitu adanya perubahan orientasi masyarakat dari berfikir tradisional menjadi modern. Karena itu akan terjadi perubahan tata nilai masyarakat dari yang berbasiskan solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik. Indikator yang bisa dilihat adalah tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi sosial ekonomi modern. Implikasi dari konsep pembangunan ini, masyarakat berkembang secara bertahap sebagai berikut: (1) Tahap Pra Industri: pada tahap ini hubungan sosial yang berkembang pada umumnya hanya terjadi dalam kelompok masyarakat (isolasi fungsional); (2) Tahap Industrialisasi: sebagai akibat dari proses industrialisasi maka terjadi perembesan (spill over) struktur budaya modern dari pusat yang berada di kota ke daerah pinggiran yang berada di pedesaan; (3) Tahap Perkembangan: pusat secara terus

menerus menyebarkan modernisasi sehingga tercapai keseimbangan hubungan fungsional antara pusat dan pinggiran.

Tesis pembangunan dualistik, berlandaskan fenomena eksistensi ganda, yaitu adanya masyarakat yang kaya (superior) dan adanya masyarakat yang miskin (inferior). Tesis ini memiliki empat syarat: (1) Dualisme merupakan prasyarat yang memungkinkan pihak yang superior dan inferior hidup berdampingan pada suatu tempat dan waktu yang sama; (2) Koeksistensi superior dan inferior bukan sesuatu yang bersifat transisional tetapi sesuatu yang bersifat kronis; (3) Superioritas dan inferioritas tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, bahkan keduanya cenderung menguat untuk menjadi kekal; (4) Saling keterkaitan antara unsur superioritas dan unsur inferioritas sehingga keberadaan unsur superioritas sedikit atau sama sekali tidak meningkatkan unsur inferioritas.

Model Pembangunan Lewis, perekonomian dianggap terdiri dari dua sektor: (1) Sektor Tradisional, dengan ciri-ciri di pedesaan, subsisten, kelebihan tenaga kerja dan produktivitas marjinalnya sama dengan nol; (2) Sektor Modern, dengan ciri-ciri di perkotaan, industri, produktivitasnya tinggi, sebagai tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari Sektor Tradisional.

Model Lewis ini memfokuskan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja di Sektor Modern, yang dimungkinkan dengan adanya perluasan lapangan kerja di Sektor Modern.

Satu perangkat asumsi teori modernisasi berasal dari konsep-konsep dan metafora yang diturunkan dari teori evolusi. Menurut teori evolusi, perubahan sosial, perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah, linier, progresif dan perlahan-lahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju, dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk dan struktur serupa.

## **Perempuan dalam Pembangunan**

Pembangunan bangsa merupakan strategi yang berupaya untuk meningkatkan kepedulian akan aspirasi kepentingan dan peranana semua warga masyarakat tidak terkecuali perempuan. Pemikiran tentang peran perempuan dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor: (1) Kodrat dari Tuhan. Wanita sebagai kodratnya mempunyai kodrat secara biologis haid, melahirkan, menyusui; (2) Tatanan social dan kebudayaan pada masyarakat. Keadaan budaya dan tatanan masyarakat di Indonesia yang beragam menimbulkan ketidakseragaman dalam kajian jender, sehingga mengarah kepada pandangan diskriminasi yang umumnya di alami perempuan dalam pembangunan.

Kesadaran tentang peran perempuan dalam pembangunan mulai berkembang pada dasawarsa 70 an yang diwujudkan dalam pendekatan program yang memusatkan pada masalah “ Wanita dan pembangunan atau Women in Developmen “ pendekatan ini memusatkan pada perempuan sebagai pelaku pembangunan sekaligus menjadi sasaran pembangunan.

Pendekatan ini kurang menyadari keterkaitan antara kondisi perempuan dengan lingkungannya, wawasan tentang peran perempuan dalam pembangunan semakin luas dan terbuka dalam dasawarsa 90 an dimana peranan perempuan dilihat secara holistic dalam hubungan kemitra sejawaran yang berbang dengan pria.

Jender diartikan sebagai konsep hubungan social yang membedakan fungsi dan peranan antara pria dan wanita yang dikonstruksikan oleh nilai social budaya yang ada dalam masyarakat. Konsep hubungan social laki – laki dan perempuan tersebut dapat berbeda diantara satu kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan lingkungan dan juga dapat berubah sesuai perubahan jaman.

Jender adalah suatu konsep yang mengacu pada system peran hubungan antara pria dan wanita yang ditentukan tidak berdasarkan biologi melainkan berdasarkan konteks politik, ekonomi social dan budaya. Peranan perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender, berarti peranan

wanita dalam pembangunan sesuai dengan konsep gender peran produktif, peran reproduktif dan peran social yang sifatnya dinamis dalam arti dapat berubah menurut perkembangan jaman.

Jender didefinisikan menjadi empat program wanita dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang mencakup:

1. Kedudukan dan peran, dilihat dari dua perspektif: (1) Peran produktif, yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang menyakut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Pean ini disebut di sector publik; (2) Peran reproduktif, adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. peran ini disebut juga peran di sector dosmetik.
2. Beban kerja dan kegiatan, adalah pembagian beban yang diberikan masyarakat dimana perempuan dan laki – laki melakukan jenis pekerjaan tertentu yang berbeda berdasarkan cici-ciri social yang diberikan atas keduanya.
3. Saling keterkaitan dan ketergantungan. Peranan perempuan dalam pembangunan akan terwujud apabila hal ini didukung oleh perilaku saling menghargai atau menghormati, saling bantu membantu, saling pengertian dan saling peduli dan saling membutuhkan antara pria dan wanita.
4. Tingkat akses dan control dalam rangka pengkajian kepekaan jender, dipengaruhi oleh beberapa faktor missal: kondisi ekonomi, Demografi, Polsos bud, Norma yang berlaku di masyarakat, Ketentuan Undang – undang dan pendidikan.

## **Permasalahan Jender**

Pembangunan negara dilakukan oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Akan tetapi, sampai saat ini masih dirasakan adanya ketidakseimbangan pembagian peran dalam pembangunan negara tersebut, dalam hal ini adalah pembagia peran antara laki-laki dengan peran perempuan. Banyak

masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan terlalu diberi porsi yang sangat kecil dan termarginalkan karena kemampuannya cenderung untuk diragukan. ini diperparah dengan adanya kepercayaan bahwa “ surga perempuan adalah berada di restu suami “ bahkan di kalangan orang Jawa mengatakan istri adalah konco wingking yang berarti hanya melaksanakan kegiatan yang menjadi kodratnya yakni “ macak ,masak dan manak “ Ketimpangan yang paling menonjol terlihat pada pembagian kerja dan pengambilan keputusan yang menyebabkan perempuan mempunyai kesempatan ,peran dan status social yang lebih rendah dari pria, perempuan dianggap secara kodrat adalah makhluk yang lemah yang ketergantungannya pada pria tinggi, Padahal jender dalam pembangunan bangsa merupakan strategi yang berupaya untuk meningkatkan kepedulian akan aspirasi, kepentingan dan peranan pria dan perempuan serta martabat perempuan disegala bidang.

Pembangunan tidak hanya menjadi isu hak asasi manusia ataupun keadilan saja, melainkan juga menjadi isu kesejahteraan untuk memperoleh keadilan. Dalam permasalahan gender dan pembangunan banyak aktivis pembangunan melihat orang sebagai sebuah sekelompok sasaran yang tidak mencoba untuk memahami realitas yang berbeda dari kehidupan laki-laki dan kehidupan perempuan, yang mengakibatkan adanya hubungan permasalahan dalam gender dan pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut misalnya:

1. Perempuan dan pendidikan. Banyak sebagian anak perempuan yang sama sekali tidak bersekolah atau hanya diperbolehkan sekolah sampai tingkat SMA dengan tujuan hanya untuk mengisi waktu untuk menunggu dipinang suaminya,, pada saat itu orangtua masih mempunyai pandangan bahwa lebih bangga mempunyai anak laki-laki dari pada perempuan. Anak laki-laki lebih bisa diandalkan dari pada anak perempuan. Dikarenakan anak laki-laki dianggap dapat melanjutkan trah atau nama keluarga serta dapat memikul tanggungjawab dan dapat melanjutkan usaha-usaha keluarga misalnya mengurus sawah, lading dan home industri yang di garap oleh

orangtuanya tersebut, serta membantu orangtua apabila orangtua mereka sudah terlalu tua . sedangkan anak perempuan dianggap kelak jika ia dewasa akan dipinang suaminya dan hanya bisa bekerja kalau diijinkan suaminya,dan hanya bisa membantu orang tua kalau diijinkan suaminya, berbeda dengan anak laki-laki meskipun kelak dewasa dan mereka akan menikah tetapi tanggungjawabnya tetap akan ia jalankan.

2. Perempuan dan pekerjaannya. Perempuan memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dari pada laki-laki. Perempuan bekerja hanya dalam kategori yang paling dieksploitasi seperti buruh dan ibu rumah tangga. Home industri seperti membuka warung Padahal perempuan mampu untuk bekerja keras dalam kinerjanya, namun untuk bekerja saja perempuan hanya mendapatkan upah yang sangat rendah dari pada laki-laki, meskipun beban yang ia tanggung sama-sama berat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Ilustrasinya adalah sebagai berikut seorang buruh pabrik perempuan dengan masa kerja yang sama dengan laki –laki di bayar lebih rendah, contoh lain seorang pegawai perempuan ketika dipromosikan untuk menduduki jabatan kepala di bidang tertentu mereka menolak dengan alasan masih punya anak kecil dan tidak diijinkan suami hal ini diperparah karena keyakinan orang Jawa khususnya yang mempunyai anggapan bahwa laki – laki adalah imam dalam keluarga dan selamanya harus jadi orang nomer 1 sehingga mereka tidak suka kalau dalam dunia kerja istrinya menduduki jabatan yang lebih tinggi dari dia.

### **Kesenjangan**

Sedikit sekali perempuan yang mempunyai kesempatan dibidang politik ini di buktikan dengan pasal 55 UU No.8 tahun 2012 yang hanya membatasi kuota perempuan 30 % dari jumlah calon anggota legislatif , dibidang sosial budaya misalnya perempuan anggota ABRI tidak diijinkan menikah dengan pria yang pangkatnya lebih rendah walaupun dengan alasan cinta. sekalipun. Perempuan hanya diberi sedikit kesempatan untuk menjadi pengambilan

keputusan dalam kelompok organisasi Darma wanita dan PKK misalnya pengambil keputusan selalu ditangan bapak – bapak karena mereka menganggap bapak – bapaklah yang mencari nafkah dan istri hanya pihak yang mendistribusikan jadi harus seijin suami.

### **Solusi Permasalahan Gender**

Seperti yang telah dijelaskan bahwa ada beberapa hubungan antara masalah gender dan pembangunan seperti masalah perempuan dengan pendidikan serta masalah perempuan dengan lapangan pekerjaan. Dari masalah gender tersebut dapat kita lihat bahwa pada kenyataannya, peran dan kesempatan perempuan dalam memperoleh pendidikan dan memperoleh pekerjaan masih sangat minim jika dibandingkan dengan kaum pria. Sehingga partisipasi perempuan dalam pembangunan juga masih kurang.

Permasalahan gender tersebut memang sudah ada sejak zaman dahulu, namun, bukan berarti permasalahan kesetaraan gender tidak dapat terselesaikan. Terdapat beberapa solusi yang dapat menjadi alternative untuk menyelesaikan masalah gender ini yaitu salah satunya dengan melibatkan pemerintah/negara dalam menyelesaikan masalah gender itu sendiri, yakni:

1. Peran pemerintah dalam permasalahan perempuan dan pendidikan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu Negara, tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan kesetaraan gender di Negara yang dipimpinnya. Bentuk peran pemerintah dalam masalah ini dapat berupa memberikan subsidi dan mengajak pihak lain untuk melakukan investasi dibidang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan perempuan. Misalnya dengan mengalakkan wajib belajar 9 th bagi semua warga Negara tanpa menghiraukan jenis kelamin dan member sanksi pada warga yang tidak menjalankan Dan dengan begitu tingkat partisipasi perempuan didalam pembangunan akan meningkat dan

diharapkan akan tercipta kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki.

2. Peran pemerintah dalam permasalahan perempuan dan bekerja. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka sangat dibutuhkan intervensi dari pemerintah. Karena dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah maka pemerintah dapat membuat UU yang mengatur tentang ketentuan kriteria pekerjaan berdasarkan pada keterampilan bukan berdasarkan pada jenis kelamin selain itu pemerintah juga dapat menentukan standar upah berdasarkan tingkat pekerjaan yang dilakukan bukan berdasarkan jenis kelamin. Peraturan tersebut tentunya ditunjukan kepada pihak perusahaan baik milik swasta ataupun milik Negara. Dengan begitu, pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman kepada perusahaan yang melanggar UU tersebut. Bila UU ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin maka dapat dipastikan kesetaraan gender di bidang tenaga kerja akan terwujud dengan sendirinya.
3. Masalah Kesenjangan di bidang Politik, Sosial dan budaya. Pemerintah bisa merevisi UU N0 .8 th 2012 agar wanita diberi kuota 50 % dalam jumlah calon kanggota legislative, organisasi wanita diberi kesempatan untuk mengambil keputusan untuk memajukan organisasinya seperti yang dicita – citakan. Dan penghapusan larangan anggota ABRI wanita untuk menikah dengan pria yang dicintainya dari pangkat yang lebih rendah.

### **Penutup**

Pembangunan berwawasan kemitrasejajaran bertitik tolak dari analisis permasalahan yang perlu dicari solusinya untuk tercapainya kemitrasejajaran laki – laki dan perempuan yang selaras , serasi dan seimbang. Kesenjangan jender yang berakar dari budaya social masyarakat yang kurang tepat perlu direvisi sesuai dengan perkembangan jaman. Perempuan lebih diberi kesempatan di bidang politik, ekonomi social dan budaya guna secara bersama – sama dengan kaum laki – laki membangun bangsa ini kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Arief, 1995, Model  
Pembangunan, LP3ES, Jakarta

Kuncoro, Mudrajat, 2000, Ekonomi  
Pembangunan, Teori, Masalah, dan

kebijakan ,UPP,AMP YPKN,  
Yogyakarta.

UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan  
Umum Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah  
dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah.